



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 250 -2024

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melahirkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas perlu adanya perencanaan penyusunan Peraturan Wali Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
- b. bahwa perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota didasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

 24

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perencanaan Penyusunan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan salah satu acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Peraturan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Wali Kota diluar rencana penyusunan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat disusun setelah adanya persetujuan Wali Kota dan/atau Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah pemprakarsa untuk dikoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.



KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2024

WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small hook.

MARFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 250 -2024
TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA
TAHUN 2025

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANA (6)	TARGET PENYAMPAIAN (7)
				BARU	UBAH		
1	PERWAKO	UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR	PEMBENTUKAN ULD PADA DINAS PENDIDIKAN	√		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JANUARI
2	PERWAKO	SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	SISTEM KERJA DILINGKUNGAN PEMDA	√		BAGIAN ORGANISASI	JANUARI
3	PERWAKO	PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN	PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN	√		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	JANUARI
4	PERWAKO	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN	√		BKPSDM	JANUARI
5	PERWAKO	PENYELENGGARAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH	PENYELENGGARAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH	√		BAPPELITBANGDA	JANUARI

6	PERWAKO	PENYELENGGARAAN MALL PELAYANAN PUBLIK	PENYELENGGARAAN MALL PELAYANAN PUBLIK	√		DPMPTSP	FEBRUARI
7	PERWAKO	PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	√		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	FEBRUARI
8	PERWAKO	PEMBERIAN TUGAS BELAJAR	TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR	√		BKPSDM	FEBRUARI
9	PERWAKO	JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI DAERAH	PENGELOLAAN JDIIH	√		BAGIAN HUKUM	FEBRUARI
10	PERWAKO	UPTD PUSKESMAS	PEMBENTUKAN UPTD PUSKESMAS	√		DINAS KESEHATAN	FEBRUARI
11	PERWAKO	RSUD KOTA BUKITTINGGI	UUBK RSUD	√		DINAS KESEHATAN	FEBRUARI
12	PERWAKO	BLUD PUSKESMAS	BLUD PUSKESMAS	√		DINAS KESEHATAN	FEBRUARI
13	PERWAKO	KEBIJAKAN AKUTANSI	KEBIJAKAN AKUTANSI	√		BADAN KEUANGAN	MARET
14	PERWAKO	PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BIDANG KEPEGAWAIAN	PENCABUTAN BEBERAPA PERWAKO BIDANG KEPEGAWAIAN	√		BKPSDM	MARET
15	PERWAKO	PERUBAHAN ATAS PERWAKO NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERDA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	KETENTUAN TEKNIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		√	BADAN KEUANGAN	MARET
16	PERWAKO	PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH		√	BADAN KEUANGAN	MARET
17	PERWAKO	SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	√		BADAN KEUANGAN	MARET

18	PERWAKO	PERUBAHAN PERWAKO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	PETUNJUK PELAKSANA PEMBERIAN TPP		√	BKPSDM/ BAGIAN ORGANISASI	MARET
19	PERWAKO	PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BIDANG PERTANIAN	PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN WALI KOTA BIDANG PERTANIAN YANG TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KETENTUAN	√		DINAS PERTANIAN	MARET
20	PERWAKO	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2025 DAN GAJI KE-13 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	MENJELASKAN BAGAIMANA TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KE 13	√		BADAN KEUANGAN	JUNI
21	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERDA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KEPEMUDAAN	KETENTUAN TEKNIS KEPEMUDAAN	√		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	APRIL
22	PERWAKO	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH	PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH	√		INSPEKTORAT DAERAH	APRIL
23	PERWAKO	EVALUASI KOTA LAYAK ANAK	PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KLA	√		DP3APPKB	APRIL
24	PERWAKO	POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	PEDOMAN POLA KARIR PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	√		BKPSDM	APRIL

25	PERWAKO	DISIPLIN PPPK	PEDOMAN DISIPLIN PPPK	√		BKPSDM	APRIL
26	PERWAKO	GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT	PENINGKATAN EDUKASI MASYARAKAT TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT	√		DINAS KESEHATAN	APRIL
27	PERWAKO	UPTD DANA BERGULIR	UPTD DANA BERGULIR	√		DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA	APRIL
28	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR	KETENTUAN TEKNIS TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR	√		DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA	APRIL
29	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN	PERATURAN TEKNIS TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN	√		DINAS PUPR	MEI
30	PERWAKO	PERUBAHAN PERWAKO HIBAH DAN BANSOS	PERUBAHAN PERWAKO HIBAH DAN BANSOS		√	BADAN KEUANGAN	MEI
31	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERDA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN	PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAN RUMAH SUSUN	√		DINAS PERKIM	MEI
32	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERDA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TRANSPORTASI DARAT	PETUNJUK PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERDA TENTANG TRANSPORTASI DARAT	√		DINAS PERHUBUNGAN	MEI

33	PERWAKO	ANALISIS STANDAR BELANJA	ANALISIS STANDAR BELANJA	√		BADAN KEUANGAN	MEI
34	PERWAKO	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	√		BADAN KEUANGAN	JUNI
35	PERWAKO	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	√		BADAN KEUANGAN	JUNI
36	PERWAKO	PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	MENJELASKAN BAGAIMANA TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	√		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JUNI
37	PERWAKO	PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF KOTA BUKITTINGGI	ATURAN TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKLUSIF, INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM, DONOR AIR SUSU IBU	√		DINAS KESEHATAN	JUNI
38	PERWAKO	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026	MENJELASKAN RKPD PEMKO TAHUN 2024	√		BAPPELITBANGDA	JULI
39	PERWAKO	PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026	DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH 2024	√		BAPPELITBANGDA	JULI
40	PERWAKO	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025	DOKUMEN PERUBAHAN RKPD 2023	√		BAPPELITBANGDA	JULI
41	PERWAKO	PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2025	PERUBAHAN PENJABARAN APBD	√		BADAN KEUANGAN	SEPTEMBER

42	PERWAKO	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD RSUD	PEMBINAAN TEKNIS DAN PEMBINAAN KEUANGAN, SATUAN PENGAWAS INTERNAL, DEWAN PENGAWAS	√		DINAS KESEHATAN/RSUD	SEPTEMBER
43	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERDA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	BEBERAPA MUATAN MATERI YANG DIMINTAKAN DISUSUN DALAM BENTUK PERWAKO	√		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	OKTOBER
44	PERWAKO	PENJABARAN APBD 2026	PENJABARAN APBD 2026	√		BADAN KEUANGAN	NOVEMBER
45	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	PERATURAN PELAKSANA PERDA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	√		DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	NOVEMBER
46	PERWAKO	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN	STANDAR SATUAN POKOK KEGIATAN	√		BADAN KEUANGAN	NOVEMBER
47	PERWAKO	PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG KEPARIWISATAAN	PERATURAN PELAKSANA PERDA KEPARIWISATAAN	√		DINAS PARIWISATA	NOVEMBER
48	PERWAKO	NASKAH DINAS ELEKTRONIK	NASKAH DINAS ELEKTRONIK	√		BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER
49	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	KETENTUAN TEKNIS TENTANG CSR	√		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	NOVEMBER

50	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2018	√		DINAS PERKIM	NOVEMBER
51	PERWAKO	UPTD RUMAH SUSUN	UPTD RUMAH SUSUN	√		BAGIAN ORGANISASI	NOVEMBER
52	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERDA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENANAMAN MODAL	PENANAMAN MODAL	√		DPMPTSP	NOVEMBER
53	PERWAKO	PERATURAN PELAKSANA PERDA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	√		DP3APPKB	NOVEMBER
54	PERWAKO	RENCANA INDUK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	RENCANA INDUK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	√		DINAS PUPR	NOVEMBER
55	PERWAKO	MASTERPLAN SMART CITY KOTA BUKITTINGGI	MASTERPLAN SMART CITY	√		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOVEMBER
56	PERWAKO	RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	√		BAGIAN PEMERINTAHAN	NOVEMBER

WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI,

MARFENDI